

Tertinggi Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Banjarbaru Terima Penghargaan



garaan pelayanan publik tahun 2023 lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel.

Pemko Banjarbaru meraih skor tertinggi untuk Kota Madya di wilayah Banua dengan nilai 92,00. Menghantarkan Ibukota Kalimantan Selatan meraih predikat "Kualitas Tertinggi" atau Zona Hijau tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.

Banjarbaru, BARITO
Ombudsman RI
Provinsi Kalimantan

Selatan menyerahkan
penghargaan kepada
Pemerintah Kota

Banjarbaru lewat penyam-
paian hasil penilaian
kepatuhan penyeleng-

Penghargaan itu dis-
erahkan Ombudsman RI
Wilayah Kalimantan

Selatan kepada Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Arifin, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Rahmah Khairita di Banjarmasin, Rabu (17/1/2024), lalu.

Prestasi Pemko Banjarbaru dalam meraih nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari komitmen dari para penyelenggara pelayanan di wilayah Pemko Banjarbaru. Mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga Dinas Kesehatan.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Arifin, mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya penghar-

gaan ini. Menurutnya penghargaan ini menjadi pemacu semangat awal tahun untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima.

"Alhamdulillah hari ini ini kita mendapat penghargaan dari Ombudsman di sektor pelayanan publik. Semoga menjadi vitamin bagi kita untuk lebih berkomitmen lagi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategori penilaian. Keempat dimensi penilaian ini meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel

penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Berikutnya, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladminis-trasi, dan terakhir dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

"Hasil penilaian tahun 2023, Ombudsman RI menyatakan kita telah memenuhi standar peningkatan pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Hasil ini harus terus ditingkatkan," tuntas Wali Kota Aditya. nsh/ang